

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dan Konsep Penelitian

1. Teori Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu hal yang semu dan selalu mengalami perubahan yang disengaja oleh aktor maupun yang merupakan dorongan dari lingkungan internasional yang selalu berubah mengikuti perkembangan interaksi para aktor dalam sistem internasional yang anarki. Kebijakan luar negeri dalam hal ini adalah alat untuk mendorong hal tersebut, termasuk juga dalam melaksanakan usaha untuk merubah perilaku dan intensi suatu aktor lain (negara lain), hal ini juga tentunya mendorong analisis (*foreign policy analysis*) dalam diskursus kebijakan luar negeri (Modelski, 1962). Bagan dibawah ini akan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri senantiasa merubah dan obyektif yang menjadi input untuk proses pelaksanaan kebijakan luar negeri digariskan dalam posisi baik secara institusional maupun secara prekondisi/ kondisi yang ada.

Penelitian ini akan berfokus pada operasionalisasi model teoritis dari restrukturisasi kebijakan luar negeri dari K.J Holsti yang merupakan improvisasi dari dua model sebelumnya. Ketiga model yang di elaborasikan pada bagian ini secara runut menjelaskan tiga hal yang berkesinambungan, di mana model pertama menjelaskan mengenai bagaimana relasi-aksi dari persepsi dan nilai yang dipengaruhi oleh kondisi obyektif dan pengaturan institusional menjadi dasar aksi kebijakan luar negeri negara. Model kedua milik Goldmann sendiri menjelaskan mengenai dasar dari perubahan kebijakan luar negeri serta elemen yang termasuk dan menjadi dasar dari penjelasan model utama restrukturisasi kebijakan luar negeri yaitu dari K.J Holsti yang merupakan perbaikan dari model Goldmann. Adapun model dari K.J. Holsti menjadi model utama

Hino Samuel Jose, 2022

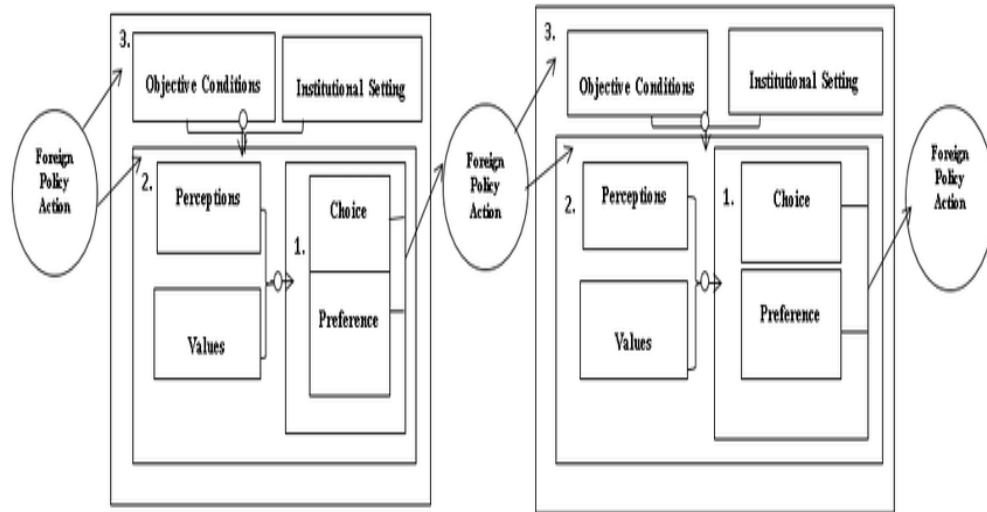
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yang kemudian menjadi acuan penulis, yang di mana model ini memiliki terobosan dari model sebelumnya yang debat kritisnya sudah dijelaskan dalam literatur terkait.

Gambar 1. Model Struktur Relasi – Aksi dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Kalayci, 2019

Dari gambar di atas bahwa kebijakan luar negeri sangat terkait dengan obyektif, kondisi lingkungan strategis, nilai-nilai kepentingan yang mempengaruhi opsi kebijakan yang diambil oleh para pimpinan pemerintah, dan nantinya akan dihasilkan dalam suatu aksi kebijakan luar negeri (Kalayci, 2019). Lebih lagi, tentunya persepsi dan nilai yang dianut oleh para aktor pengambil kebijakan luar negeri akan bergantung pula pada setting institusional yang dipengaruhi oleh rezim internasional maupun nasional. Agen dan struktur dalam kebijakan luar negeri, merupakan elemen penting dalam memahami struktur relasi dari kebijakan luar negeri dalam diskursus ilmu sosial terutama dalam menjelaskan dan memahami kebijakan yang diambil aktor dalam permasalahan hubungan internasional (Wendt, 1987).

Kebijakan luar negeri dalam hal ini adalah suatu elemen dalam merealisasikan kepentingan nasional yang diterjemahkan dalam bentuk aksi untuk mencapai obyektif dari kepentingan nasional dalam level internasional dan melibatkan hubungan luar

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negeri (Padelford & Lincoln, 1962). Dalam hal ini, formulasi kepentingan luar negeri juga berdiri sebagai pola dalam negosiasi untuk melindungi atau memperdalam kepentingannya terhadap isu-isu spesifik maupun tematik (Nafisa, 2017). Adapun dalam kebijakan luar negeri ada beberapa model-model penting yang harus diketahui ketika mencermati proses formulasi kebijakan luar negeri. Snyder et al (1969) menjelaskan secara detail bahwa faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam manifestasi kebijakan luar negeri suatu negara yang mempengaruhi pola dan rasionalisasi para aktor pengambil kebijakan (Snyder, Bruck, & Sapin, 1969). Secara dasar, tentunya kebijakan yang menjadi salah satu inti dari proses hubungan internasional memerlukan kekuasaan dalam eksekusi kebijakan yang ada, tentunya kekuasaan ini juga beroperasi bersamaan dengan tujuan sebagai arah kebijakan dan yang mengambil keputusan harus menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan politik luar negeri (Budiarjo, 1995). Operasionalisasi kebijakan luar negeri sendiri dilakukan dalam proses yang kompleks, dan bergantung pada relasi interpersonal, situasi rezim pemerintahan, dan psikologis yang dapat merubah suatu kebijakan luar negeri (Morgan, 1991).

Karena dinamika politik internasional dan domestik yang selalu berubah-ubah, tentunya kebijakan luar negeri akan mengalami reorientasi yang dapat diasumsikan sebagai perubahan, baik yang di inisiasi dari internal suatu aktor negara maupun baik secara di dorong oleh faktor eksternal dari lingkungan bilateral, regional, dan multilateral. Reorientasi kebijakan luar negeri sendiri menurut Holsti (2016) sangatlah erat dengan perubahan pola hubungan dan transaksi politik luar negeri yang secara total maupun parsial. Hal ini secara intens terjadi sangatlah dalam dan membuat aktor menekankan perubahan baik dalam struktur maupun atau sistem politik luar negerinya (Holsti K. , 2016).

Dalam penelitian ini, difokuskan pada restrukturisasi kebijakan luar negeri suatu negara yakni Indonesia, pada level multilateral di DK PBB yang merupakan suatu organisasi internasional. Penelitian terdahulu sendiri masih banyak memperdebatkan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengenai perubahan dan analisis dalam studi kebijakan luar negeri yang terkait dengan organisasi internasional di mana institusi seperti PBB dianggap tidak akan efektif dalam implementasi norma dan ketetapan yang ada karena kedaulatan negara masih tegak berdiri dalam sistem internasional yang anarki (realis). Hal ini secara tegas dibantah oleh neoliberal institusionalisme yang mendorong fasilitasi kerja sama dalam sistem anarki yang mampu menyelesaikan isu seperti *prisoner's dilemma* yang menjadi tantangan dalam kerja sama (Islam, 2009). Hal ini sendiri dibahas juga dalam penelitian yang menegaskan bahwa rasionalitas aktor negara (*state rationality*) masih menjadi fokus penegasan utama dari neoliberal institusional yang digunakan untuk secara maksimal memanfaatkan kerja sama dalam mencapai tujuan secara absolut (Saryal, 2015). Narasi ini juga aplikatif dalam menjelaskan reorientasi kebijakan luar negeri, yang di mana menurut Keohane (1989) dan Young (1989) yang berargumen bahwa aktor negara dalam politik internasional akan selalu rasional dalam seluruh diskursus internasional, termasuk pada isu politik-keamanan dan rezim internasional (Keohane, 1989; Young, 1989).

Kembali dalam aspek kebijakan luar negeri lebih mendalam, perubahan dalam perilaku luar negeri suatu aktor negara juga dipengaruhi oleh dinamika blok politik yang terbentuk, baik dalam suatu isu tematik maupun isu spesifik, yang dijelaskan lebih dalam pada fondasi konsep perubahan dari struktur kebijakan luar negeri ini seperti dari penelitian akhir tahun 1980-1990an. Seperti penelitian dari Carlsnaes (1993) yang menjelaskan bahwa dinamika perubahan dan rekonseptualisasi kebijakan luar negeri yang terjadi dapat di analisis dari model yang bergantung pada input dan output suatu kebijakan luar negeri. Carlsnaes melontarkan bahwa model analisis kebijakan luar negeri dari Charles Hermann dan Kjell Goldmann memang menekankan pada proses pengambilan kebijakan sebagai sentral dari model analisis mereka yang sama-sama menekankan pada input dan output, kedua akademisi tersebut gagal untuk melepaskan diri mereka dari suatu model yang sangat bergantung pada pendekatan *behaviouralistic* semata (Carlsnaes, 1993).

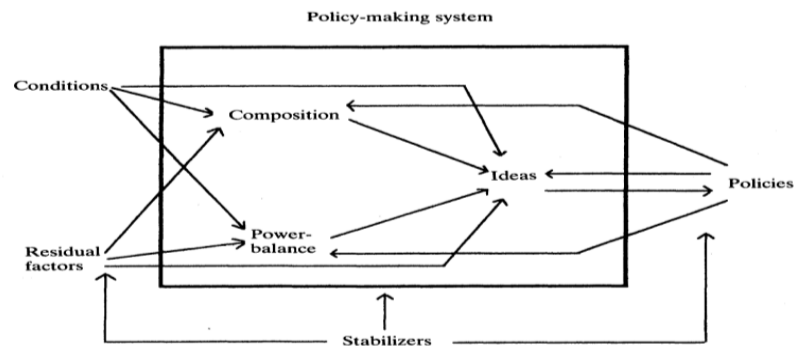
Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar 2. Model Pemikiran Goldmann Dalam Proses Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri



Sumber: Carlsnaes, 1993

Dari model Goldman diatas, ditekankan bahwa ide, komposisi, keseimbangan kekuatan, menjadi bagian integral dari sistem proses pengambilan kebijakan, namun tentunya hasilnya akan membutuhkan faktor eksternal untuk menentukan kestabilan dan ketahanan suatu kebijakan untuk dapat berlangsung. Hal ini di kritik oleh Carlsnaes juga karena model seperti ini sangat tergantung pada pola dan kebiasaan para aktor pengambil kebijakan, sementara faktor penting seperti keseimbangan kekuatan (*balance of power*) sendiri terpengaruhi oleh faktor residual lain. Narasi ini juga tegak lurus dengan kondisi eksternal dan internal serta bagaimana nantinya komposisi dari ide kebijakan luar negeri memproduksi output berupa aksi kebijakan luar negeri. Carlsnaes menekankan pentingnya suatu model analisis kebijakan luar negeri yang tersentralkan pada proses pemikiran inovatif dan adaptif serta suatu perubahan kebijakan luar negeri tidak semata-mata didasarkan pada *habit* atau kebiasaan suatu institusi (*habit-driven*), sehingga bisa diciptakan suatu diskursus kebijakan luar negeri yang memiliki otonomi pengetahuannya sendiri (Carlsnaes, 1993).

Literatur berikutnya membahas bagaimana suatu kebijakan luar negeri mengalami perubahan yang signifikan, dengan Hudson dan Vore (1995) mengevaluasi kembali bahwa seharusnya dalam menganalisis perubahan kebijakan luar negeri harus

Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kembali memperhatikan juga tidak hanya *actor-specific* tapi juga bagaimana potret dan persepsi dalam dinamika teori itu sendiri berubah. Kaitannya dengan perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan adalah di mana nantinya akan ada korelasi dan hubungan mutualisme antara diskursus politik komparatif dan kebijakan luar negeri (Hudson & Vore, *Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow*, 1995). Kemudian, perubahan dalam kebijakan luar negeri itu sendiri apabila memang memiliki hubungan mutualisme dengan diskursus politik komparatif, dinilai harus dapat dituntut lebih ejal ketika menjelaskan bagaimana legitimasi publik terhadap para pembuat kebijakan luar negeri. Hal ini dibahas sebagai suatu bentuk tuntutan terhadap polugri yang mampu bertahan dan memperoleh dukungan publik, termasuk apabila ada terjadi perubahan, dan bagaimana *turnover* diperoleh dari proses tersebut yang tentunya tidak lepas dari pola kepemimpinan aktor domestik (Mattes, Leeds, & Carroll, 2015). Narasi ini juga mendukung suatu negara melakukan reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan transformasi kebijakan luar negeri yang di inisiasi untuk menciptakan kontribusi dan peran yang lebih selektif untuk mendukung kemajuan suatu negara yang terikat dan bergantung pada kepentingan domestik (Rosyidin, 2017; Doeser, 2011). Lebih lagi di bahas sebelumnya, yang menjadikan modalitas kebijakan domestik bukan sebagai cermin untuk tempat kebijakan luar negeri berkaca, tetapi lebih kepada bagaimana proses politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri, dan bagaimana pihak asing dari negara lain merefleksikan citra politik negara tersebut (Pehe, 1998).

Restrukturisasi kebijakan luar negeri tentunya tidak akan terlepas dari pola baik secara adaptif maupun fleksibel, oleh karena itu dijelaskan oleh Goldmann bahwa kebijakan luar negeri akan selalu adaptif terhadap lingkungan mereka berada, dan *external shock* juga menjadi pemicu restrukturisasi kebijakan luar negeri (Goldmann, 1988). Hal ini menjadi modalitas utama dari narasi bahwa perubahan yang ada mempertimbangkan lingkungan strategis yang negara alami menjadikan kebijakan luar negeri sebagai bentuk mediasi dampak eksternal ke lingkungan domestik (Hill, 2003).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tentunya ini kembali dijelaskan oleh para ahli dalam literatur sesudahnya di mana perubahan kekuatan (*power shift*) dan perubahan kontur dalam diskursus hubungan internasional kontemporer menjadi narasi umum yang diterima dan populer dalam mengaitkan hal tersebut (Kahler, 2013; MacDonald & Lemco, 2011; Rosyidin, 2017). Masuk ke dalam sebab perubahan, adanya suatu kerja sama dan konflik menjadi faktor yang lebih memuaskan dalam menjelaskan bagaimana dinamika reaksi, *institutional memory*, dan perilaku aktor terjadi yang sekaligus menjadi faktor determinan dalam analisis kebijakan luar negeri (Ward, 1982).

Setelah melihat model *Goldman* dan model struktur-relasi diatas, kemudian kedua model itu menjadi dua hal yang di improvisasi oleh KJ Holsti dalam model restrukturisasi kebijakan luar negeri tiga variabelnya. Adapun improvisasi ini terus terjadi karena perubahan dinamika dalam tekstual analisis perubahan kebijakan luar negeri dinilai cukup lambat dan prosesnya bersifat sporadis (Hudson, 2012). Restrukturisasi kebijakan luar negeri yang menjadi pembahasan penting dalam penelitian ini sendiri merupakan suatu proses reorientasi yang menekankan pada perubahan baik yang simultan maupun secara keseluruhan (Holsti, 2016). Hal ini juga dijabarkan secara mendalam oleh Holsti (2016) bahwa restrukturisasi kebijakan luar negeri memiliki tiga variabel yaitu: (1) variabel independen yang terbagi dalam tiga faktor utama yaitu faktor lingkungan eksternal dari ancaman militer/ non-militer, faktor domestik dan kondisi status quo nasional dalam sosial-ekonomi, dan latar belakang sejarah serta faktor budaya dari pengalaman suatu negara; (2) variabel intervensi yang fokus pada para aktor, proses, kepribadian, dan bagaimana sikap para elit politik dalam memandang suatu kondisi eksternal dan proses pengambilan keputusan dalam polugri; dan (3) variabel dependen yang fokus kepada partisipasi dan keterlibatan aktor yang memiliki intensi tertentu baik untuk mengubah, menghapus, maupun mengambil kebijakan baru dalam aksi reaksi terhadap perubahan di lingkungan internasional ke domestik maupun dari domestik ke luar (Holsti, 2016).

Hino Samuel Jose, 2022

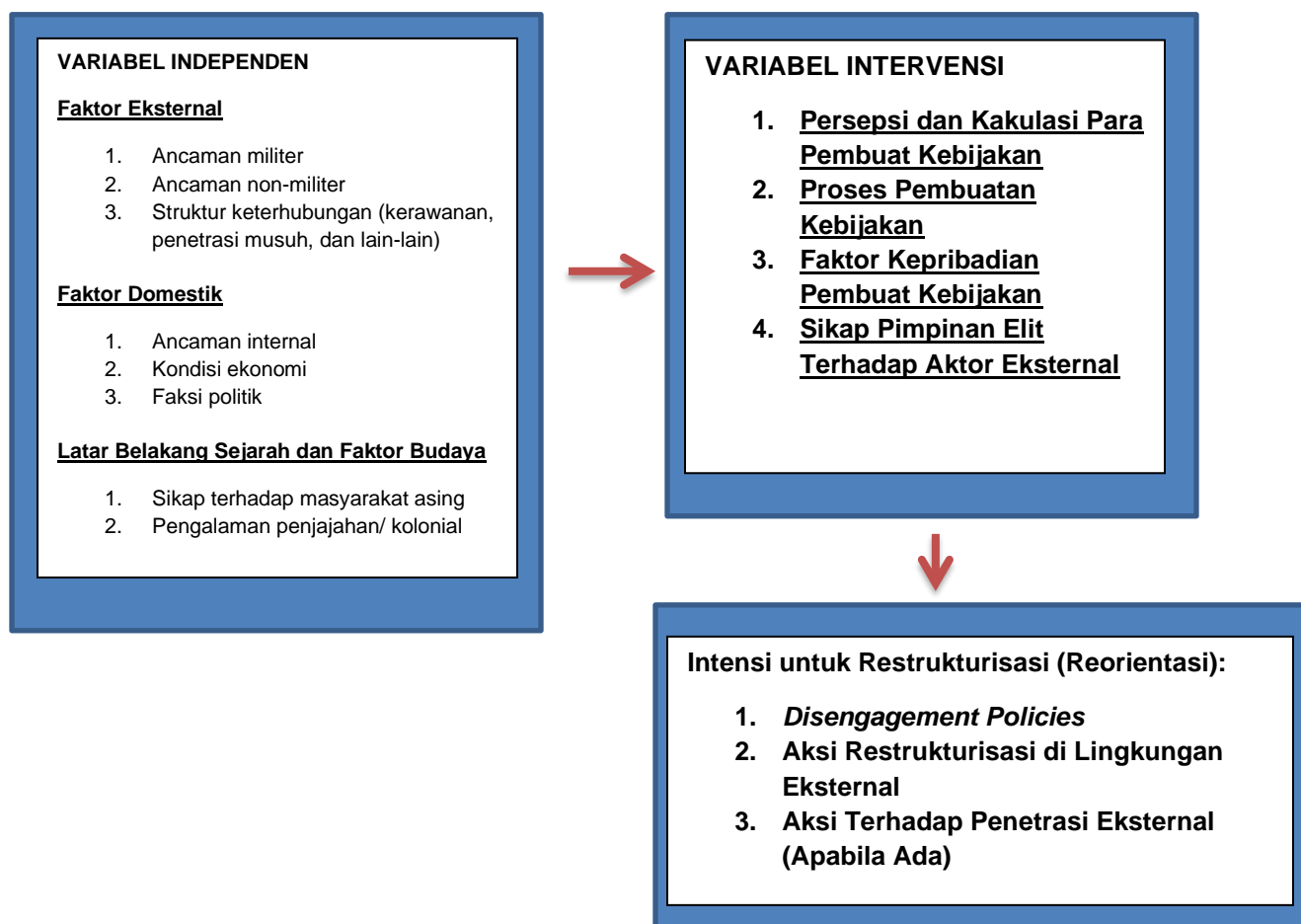
***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar 3. Model Analisis Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri Tiga

Variabel K.J Holsti



Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Holsti, 2016

Model yang diusung oleh Holsti dalam memahami restrukturisasi kebijakan luar negeri tentunya didasarkan dengan asumsi bahwa aksi polugri adalah hal yang bersifat *authoritative* dan berorientasi untuk mempromosikan atau menyelesaikan perubahan dalam lingkungan internasional (Wilkenfeld, 1980; Holsti K. , 1983; Holsti K. , 2016). Secara tekstual, model yang diperkenalkan Holsti (2016) kemudian diperdalam sebagian dalam pandangan *advocacy coalition framework* atau kerangka berpikir yang menekankan pada peran koordinasi para aktor pembuat kebijakan dan politik domestik yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri (Haar & Pierce, 2021). Mengenai restrukturisasi kebijakan luar negeri, dalam aspek *continuity* (keberlanjutan/ kesinambungan) dan *change* (perubahan), literatur sebelumnya menjelaskan bagaimana restrukturisasi kebijakan luar negeri menggunakan *coalition framework* menawarkan lensa pendekatan yang mengkaji *power balance* dan pemutusan kebijakan dari waktu ke waktu (Lantis, 2019).

Restrukturisasi kebijakan luar negeri tentunya tidak akan terlepas dari berbagai tingkatan dalam model analisisnya, yang di mana walaupun sebelumnya Herman di kritik, akan modelnya yang terlalu *habit-driven* (semu didorong pada kebiasaan rezim institusi politik), model ini masih relevan dengan penjelasan empat (4) tingkatan restrukturisasi kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 1993). Tingkatan pertama adalah perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri tingkatan bawah yang lebih bersifat kuantitatif karena yang berubah adalah bagaimana aksi polugri tersebut dilakukan, dan ekspektasi hasil dan tujuan akhir dari kebijakan luar negeri tersebut masih sama (Hermann, 1990). Hal ini sendiri sepakat dengan apa yang dijelaskan Holsti (2016) dalam bukunya bahwa perubahan dari dilema baik pada konteks *security dilemma* maupun *prisoner's dilemma* yang terjadi misalkan di Pakistan-India dan India-Tiongkok merupakan adisi yang merubah kompleksitas, namun pada akhirnya tujuannya masih sama yaitu perubahan dalam merespon hegemoni yang dipersepsikan

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

satu sama lain (Holsti K. , 2016). Tingkatan kedua adalah perubahan pada program baik dari aksi maupun paket kebijakan luar negeri itu sendiri, di mana sifatnya lebih kualitatif, adapun yang berubah adalah instrumen yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri namun tujuan akhirnya tetap tidak berubah (Hermann, 1990). Adapun beberapa instrumen kebijakan luar negeri yang dimaksud sendiri tidak disebutkan secara rinci, namun oleh Spitzer et al dalam bukunya mengacu pada instrumen polugri dari Amerika Serikat yaitu diplomasi, PBB, struktur moneter internasional, bantuan ekonomi, keamanan kolektif, dan *sense of deterrence* dalam konteks militer (Spitzer, Ginsberg, Lowi, & Weir, 2005). Hal ini tentunya bisanya dipakai dalam menyesuaikan program pemerintah dalam melakukan resolusi konflik dan untuk mencapai *confidence* diantara para aktor dari aksi kebijakan luar negerinya (Peter, 2002). Tingkatan ketiga adalah perubahan tujuan dan obyektif dari suatu kebijakan luar negeri yang lebih meluas dan ekstensif, serta bersifat untuk melakukan penyesuaian ulang secara menyeluruh (Hermann, 1990). Perubahan secara menyeluruh ini dianggap sering dan mungkin untuk terjadi apabila suatu negara mengalami konflik dan ketidakstabilan politik serta transisi kepemimpinan yang biasanya dipicu oleh dampak dari kejadian peristiwa dan tekanan waktu, serta krisis yang meluas (Broesamle, 1990). Kelanjutan dari perubahan aksi kebijakan luar negeri ini sendiri baik secara konstan maupun berkesinambungan dipandang sebagai asumsi yang relevan, namun adalah dua hal dengan proposisi yang berbeda (Rosenau J. , 1978). Terakhir tingkatan ke-empat adalah penyesuaian orientasi internasional yang sangat luas dan berimplikasi cukup signifikan secara global yang sangat terkait (*intertwined*) dengan berbagai kejadian dan isu internasional (Hermann, 1990). Perubahan ini memang senarasi dengan variabel yang digunakan Holsti dalam menganalisis restrukturisasi kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya (Holsti K. , 2016). Untuk menyimpulkan, suatu restrukturisasi kebijakan luar negeri yang dilakukan pada isu tertentu merupakan salah satu dari hasil pengujian pola kebijakan luar negeri yang diteliti oleh Hagan pada karyanya tahun 1989. Adapun ke-4 hasil yang

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ditemukan, selain daripada restrukturisasi itu adalah: (1) intensifikasi kebijakan luar negeri yang diperkuat untuk mencapai tujuan dan cakupan strategis dari kebijakan luar negeri; (2) *refinement* atau penghalusan kebijakan luar negeri melalui perubahan kecil yang bersifat minoritas; (3) reformasi kebijakan luar negeri yang melibatkan perubahan moderat dalam aspek strategis dan cakupan suatu kebijakan luar negeri; dan (4) restrukturisasi kebijakan luar negeri yang mampu hingga ke level perubahan besar (mayoritas) (Hagan, 1989).

Berbagai literatur lain dalam diskursus restrukturisasi kebijakan luar negeri juga menyinggung tiga model unit analisis yang bukan melihat pada intensi maupun cakupan restrukturisasi yang berubah seperti paragraf sebelumnya, namun menekankan pada perubahan unit level analisisnya. Ketiga elemen ini tentunya masih berkaitan dan sangatlah erat dengan model restrukturisasi kebijakan luar negeri dari KJ Holsti. Pertama adalah perubahan tipologis pada model *checklist* yang juga melibatkan perubahan program dan intensi dari suatu kebijakan luar negeri (Holsti K. , 1982). Kedua adalah *structural-constraints model* yang mempertimbangkan batasan-batasan struktural dari sistem yang ada sehingga fokus pada perubahan baik verbal maupun non-verbal dalam definisi sesuatu kebijakan luar negeri (Goldmann, 1982). Masih dalam model kedua, perubahan tersebut apabila diperluas konteksnya juga mencakup program suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk dalam konteks yang lebih general dan biasanya merupakan program-program yang fokus pada perubahan sporadis/evolusioner (Skidmore, 1994). Ketiga adalah *cyclical model* yang lebih menekankan pada hasil yang tidak memiliki perubahan spesifik dan hal-hal yang mempengaruhi jalannya suatu program kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 1993). Namun, model ketiga ini apabila di bawa pada konteks tingkatan yang lebih tinggi akan hanya bersifat merubah pada program suatu kebijakan luar negeri (Rosati, 1994). Ketiga model ini memang lebih kompleks, namun menjelaskan implikasi, logika, dan studi empiris dari perubahan-perubahan dalam diskursus kebijakan luar negeri yang dipetakan juga lebih

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

lanjut dalam memberikan paradigma baru dalam memahami reorientasi serta dinamika perubahan dalam studi analisis kebijakan luar negeri (Gustavsson, 1999).

2. Konsep *Middle Power* Dalam Hubungan Internasional

Hubungan internasional fokus pada negara, dan negara itu sendiri memiliki klasifikasi yang berbeda, yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana negara tersebut berinteraksi dan dipelajari untuk pola perilakunya dalam studi HI. *Middle power* sendiri berada di bawah tingkatan negara besar namun diatas negara *small power* (Jordaan, 2003). Dalam studi HI, konsep *middle power* sendiri membahas bagaimana negara yang masuk dalam klasifikasi tersebut memiliki implikasi yang cukup berarti pada politik global dan terhadap posisi negara maju dengan kekuatan yang lebih besar (*great power*) (Lee, 2015). Konsep *middle power* ini dalam literatur kontemporer sering dijelaskan sebagai suatu diskursus alternatif yang membuka dirinya di tengah adanya sistem internasional yang terdominasi oleh kekuatan besar yang masih bertahan hingga perang dingin selesai, dan bagaimana aktivitas diplomasi para negara *middle power* ini dapat memberikan perspektif *bottom up* baru dalam HI di tengah perdebatan mengenai hierarki global (Cooper A. , 1997). Konsep ini sendiri juga fokus bagaimana aktivitas suatu negara *middle power* dalam HI terus ditingkatkan sehingga aktivisme mereka mampu memberikan pengaruh walaupun mengalami batasan-batasan (*constraint*) dalam strategi maupun opsi langkah kebijakan luar negerinya (Ravenhill, 1998).

Lebih dalam mengenai *middle power* itu sendiri, literatur sebelumnya menggambarkan bahwa konsep tersebut sangatlah erat dengan aspek fungsional, behavioural, teoretikal, dan hierarki yang teraplikasikan dalam *status quo* (Teo, 2021). Hal ini tentunya membuat *middle power* menjadi konsep yang terfokus pada relasi dengan pendekatan identitas sosial suatu negara dalam pergaulan internasional ketimbang suatu pengelompokan negara yang fokus hanya pada konsepsi dirinya sendiri (*self-conception*) semata dalam mengklasifikasikan status negaranya dalam

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tatanan dunia (Thies & Sari, 2018). Asumsi ini sendiri juga dibahas lebih lanjut dalam narasi di mana pendekatan dalam mencari identitas *middle power* sebagai jati diri suatu negara fokus pada keterlibatan dalam konflik maupun mediasi baik secara bilateral maupun dalam suatu kawasan (Azra, 2015). Konsep ini tentu akan melibatkan diskusi sebelumnya yang menjelaskan mengenai keberadaan hirarki kekuatan, sistem unifocal, sistem dualistik, sistem triangular, dan sistem multipel dalam menjelaskan pola perilaku suatu negara *middle power*, ditambah dengan bagaimana aktivisme suatu negara *middle power* di PBB menunjukkan korelasi positif (Holbraad, 1984). Penelitian sebelumnya oleh Alvian et al (2018) menggunakan konseptualisasi analisis kebijakan luar negeri suatu negara *middle power* yang dapat dipahami melalui penjelasan akan dua unsur yaitu *relational power* dan *metapower* (Alvian, Putri, & Ardhani, 2018). Kedua unsur tersebut berinti pada bagaimana *middle power* bangkit dan berjuang untuk meraih status sebagai *great power* maupun dalam mewujudkan kepentingan nasional di tengah keterbatasan sebagai seorang *middle power*.

Keberadaan *relational power* sendiri dibahas sebagai suatu kekuatan yang dimiliki suatu entitas/ aktor/ objek yang mampu mempengaruhi entitas/ aktor/ objek lain yang dalam ilmu sosial dianggap sebagai sebab dari tidak meratanya distribusi kekuatan (*power distribution*) dan hasrat untuk mendominasi aktor lain (Azmanova, 2018). Dalam diskursus ilmu HI secara lebih spesifik dibahas oleh Hagsrom (2015) dan Waltz (1979) sebagai kekuatan yang merupakan hasil dari kapabilitas suatu negara; sehingga bukan merupakan efek dari sesuatu sebab dari relasi dua negara atau lebih (Hagstorm, 2005; Waltz, 1979). Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana aktor pembuat kebijakan luar negeri menentukan langkahnya mempertimbangkan kapabilitasnya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada untuk mencapai keinginan, yang dilakukan dalam pendekatan *relational power* (Holbraad, 1984). Peningkatan kapabilitas erat dengan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antar negara, sehingga aktor dengan kapasitas yang lebih besar akan lebih rawan mengalami intervensi dari entitas eksternal yang akan di respons dengan tindakan *balancing*

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

terhadap aksi tersebut (Ricciuti & Rossignoli, 2017). Terkadang cara memahami pemilahan konteks mengenai kapabilitas ini menghasilkan beberapa hal ambigu seperti pengelolaan kebijakan luar negeri antara *small power* dan *middle power* yang masih berfokus pada konsepsi negara; di mana *small power* fokus pada peran aktif dalam organisasi internasional (East, 1973). Sementara *middle power* pada peran membangun jembatan antar kepentingan dan membangun koalisi yang berkontribusi penuh yang terbentuk dari level regional ke global dengan kebijakan kooperatif dan mampu untuk mengelola pengaruh *major power* (Baba & Onsoy, 2016; Spero, 2009). Yang di mana kedua hal ini dinilai bersinggungan, namun keduanya sama-sama memerlukan evaluasi kembali akan opsi kebijakan luar negerinya terutama dalam mempertimbangkan dinamika lingkungan global dalam persepsi, reaksi, dan kepentingan yang ada (Baba & Onsoy, 2016; Hawes, 1984).

Kemudian Alvian et al (2018) juga mengoperasionalkan kerangka analisis kebijakan luar negeri *middle power* dalam bagaimana hasrat aktor memperoleh posisi strategis dalam “institusi” yang ada dalam sistem internasional (*institutional-setting*). Hal ini sebelumnya sejenis dengan apa yang dibahas dalam dua perspektif yaitu dari kajian rasionalis yang menekankan pada kompetisi para aktor serta mengurangi beban dari transaksi kerja sama yang dilakukan, di mana institusi berperan untuk mengurangi beban dalam bekerjasama dan memberikan kepastian (Keohane, 1988; Wendt, 1987). Lebih lanjut pada kajian kedua yaitu reflektif yang menekankan pada kemunculan institusi internasional sebagai akibat dari proses deliberasi sosiologis dan menawarkan ide pelengkap akan hal yang tidak dijelaskan oleh kajian rasionalis, beberapa contoh elemen penting yang dikaji juga melingkupi norma, sejarah, dan preferensi para aktor (Keohane, 1988). Kedua kajian ini tentunya memerlukan aksesibilitas bagi para aktor dalam suatu institusi internasional untuk mengoperasionalkan rezim internasional yang berbeda untuk mencapai kesuksesan suatu obyektif politik luar negeri negara dalam area isu tertentu (Krasner, 1985). Sedangkan dalam pendekatan *metapower*, aktor/entitas/obyek dalam tatanan global tidak hanya berusaha untuk memperoleh

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

posisi strategis semata, tetapi juga bagaimana *metapower* yang fokus pada mengontrol entitas lain juga mampu untuk mengontrol jalannya proses pembentukan desain institusi internasional, yang akan didukung oleh aktor lain untuk di ikuti secara kolektif (Berenskoetter & Williams, 2007). Proses kontrol ini tentu dipengaruhi oleh warisan dari sistem kerajaan (*empire*) di dunia pada zaman dahulu yang telah berubah menjadi sistem kenegaraan (*statehood*) yang salah satunya adalah keinginan aktor untuk mendesain institusi yang memiliki ketetapan moral dan standar yang sama serta berangkat dari kepercayaan akan nilai yang sama, yang memicu blok politik dalam ruang politik internasional (Rosenboim, 2019). Impulsifitas negara yang mendorong pola perilaku di analisis dalam perspektif neuro-biologis sebagai

Bagian berikutnya masih dalam konteks *relational power* sebagai pendekatan diplomasi negara *middle power*, penelitian Alvin et al (2018) juga menekankan pada keberadaan suatu aktor yang mencari pengakuan dari level global. Hal ini dikaji sebagai suatu usaha untuk melakukan materialisasi konstruktif yang logis dan sesuai dengan kepentingan aktor *middle power* baik secara fungsional maupun *behavioral* (Hynek, 2004). Hal ini sebenarnya berkaitan dengan hal sebelumnya yaitu peran *institutional setting* yang mendukung perkembangan para aktor. Adapun di sini pengakuan yang dicari oleh para aktor dari komunitas internasional itu sendiri dilakukan dengan kontribusi aktor dalam pembentukan norma (*norm-setting*) yang dianggap juga sebagai produk kebijakan luar negeri yang dapat membatasi/ mendukung pencapaian kepentingan suatu aktor (Björkdahl, 2002). Serta, bagaimana kekuatan dari norma internasional yang dibentuk dalam institusi dipertetangkan dengan kewajiban dan hak suatu aktor yang di mana akan terbentuk masalah seperti pelanggaran dan penguatan norma (*norms violation & norms enforcement*) (Shannon, 2017). Dalam upaya mencari pengakuan (*international recognition*), negara *middle power* berperan aktif dalam kerja sama multilateral yang lebih informal seperti MIKTA yang dinilai memberikan dinamika baru dalam menilai modalitas negara *middle power*

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dalam mencapai kepentingan operasional kebijakan luar negeri negara berkembang (Cooper A. , 2017).

Setelah berbicara akan *relational power* yang terjadi dalam pembentukan norma, aktor juga senantiasa akan melakukan redefinisi norma baru yang senantiasa akan di ikuti oleh aktor lain, yang menjadi indikator utama bagaimana mereka diakui dalam tatanan politik internasional (Berenskoetter & Williams, 2007). Hal ini dalam Alvin et al (2018) dikaji dalam pendekatan *metapower*, yang di tetapkan dalam kajian ilmu sosial mengenai kekuatan yang dimiliki suatu entitas/individu/obyek dalam mengontrol entitas/individu/obyek lain tetapi juga mampu untuk mengontrol struktur sosial (Baumgartner, Buckley, & Burns, 1975). Yang di mana kehadiran *metapower* ini juga menjadi bagian dalam diskursus intervensi kemanusiaan dalam tatanan global, yang dikaji melalui peran institusi termasuk DK PBB sebagai pemain utama untuk melakukan intervensi kemanusiaan melalui *metapower* terhadap ancaman perdamaian dan keamanan internasional (Peltonen, 2012). Adapun aktor yang terpengaruh akan dampak dari *metapower* ini dikaji dalam perspektif post-strukturalis dalam HI yang menekankan pada realita, studi empiris, dan situasi radikal hegemoni dunia post-modern yang mempertentangkan ide tradisional (Nabers, 2015). Norma-norma baru yang terbentuk beririsan dengan bagaimana reseptor dari para aktor akan bergantung pada redefinisi yang terjadi karena perubahan dinamika dari para *major power* yang dibahas secara komprehensif dari berbagai perspektif termasuk konstruktivisme, realisme, dan konseptualisasi *power* (Guzzini S. , 2013). Dalam kajian HI, hal ini merupakan bagian dari redefinisi ilmu HI yang saling tarik menarik dengan tatanan praktik diplomasi dan bagaimana refleksi teori HI bergantung pada 4 elemen teorisasi yaitu normatif, meta-teoritis, ontologis, dan empiris (Guzzini S. , 2013). Tentunya keinginan para aktor mengikuti sumber dari *metapower* itu sendiri juga berhubungan dengan perilaku aktor yang didorong oleh kebiasaan yang secara rasional membentuk preferensi masing-masing aktor dalam menetapkan maupun mengikuti suatu norma, terutama dalam tatanan fungsional diplomasi (Rosenau J. , 1986).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Interaksi kedua unsur *relational power* dan *metapower* dalam mencapai obyektif polugri suatu negara *middle power* juga erat dengan proyeksi dari arah pembangunan identitas nasional yang merupakan bagian integral dalam suatu visi *nation-building* yang tentunya akan berbeda-beda diantara satu negara *middle power* dengan negara lainnya (Easley, 2012). Adapun narasi ini juga berdasar dari bagaimana kondisi politik internasional pasca perang dingin yang membuat kepentingan negara tidak banyak dalam ruang fungsional dari struktur kekuatan *middle power*, namun akan lebih banyak pada konteks geopolitik yang dipengaruhi oleh kompetisi *major power* (Cooper D. , 2011). Idealisme dari suatu negara dalam yang melakukan konseptualisasi ide dan identitas nasionalnya menjadi faktor yang terikat dalam analisis kebijakan luar negeri dengan peran yang signifikan dan berpengaruh dalam diskursusnya (Burke & Reitzes, 1981). Masyarakat yang menjadi konstituen pemerintah adalah entitas yang mampu mengubah konseptualisasi diri sendiri (*self-conception*) dari sebuah negara *middle power* dalam mencapai ambisi internasional yang terpengaruhi oleh tekanan dari norma global yang telah dinegosiasikan dibawah perhatian para konstituen nasional yang mengamati terus melalui media (Acharya, Whose Ideas Matter?: Agency and Power in Asian Regionalism, 2009; Easley, 2012). Dapat dikatakan, bahwa dalam analisis kebijakan luar negeri, baik yang bersifat transaksional maupun tidak akan berkaitan erat dengan kepatuhan aktor, dan bagaimana resiprositas dapat di dorong karena kepatuhan akan subyektif terhadap moralitas masing-masing aktor, dan bagaimana pola perilaku dibentuk secara fundamental oleh jejaring rezim, prinsip, dan norma yang dimiliki (Tarzi, 1998). Yang di mana interaksi ini difokuskan pada dua kondisi, baik dalam konteks para aktor menjaga kestabilan keseimbangan kekuatan (*stable balance of power*) atau sistem bipolar yang lebih longgar (*loose bipolar system*) yang menjadikan aktor eksternal blok/ kelompok mereka sebagai *referent object* untuk mengelola perbedaan yang persisten dalam realisasi obyektif aktor dalam sistem internasional (Handrieder, 1965).

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Kerangka Pemikiran

Alur pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah melakukan pengkajian terhadap peran Indonesia di DK PBB sebagai negara berkembang, dalam hal ini diawali terlebih dahulu dengan adanya dilakukan analisis terhadap negara-negara *middle power* yang telah bergabung menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebelumnya dalam jangka waktu sepuluh tahun ke belakang. Adapun sepuluh tahun ke belakang (1 dekade) masih memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan kawasan (regional) dari negara anggota tidak tetap masing-masing DK PBB dengan apa yang terjadi pada isu geopolitik dan keamanan internasional masa kini. Peran dan kontribusi negara *middle power* yang merupakan anggota tidak tetap DK PBB diasumsikan mampu untuk memproyeksikan kekuatan mereka mempertimbangkan kapabilitas ekonomi dalam menegakkan kepentingan mereka dan memiliki *Gross National Product* yang di bawah negara *major power* (Jordaan, 2003). Hal yang kemudian membentuk advokasi dan gaya kepemimpinan mereka dalam inisiatif di forum multilateral dan perilaku dalam level regional dalam praktik kebijakan luar negerinya (Nolte, 2010). Sehingga, klasifikasi *middle power* akan memiliki sifat dan karakter tersendiri dalam mengelola hubungan luar negerinya dengan *major power*, *small power*, dan *middle power* lainnya dalam penegakan kebijakan luar negerinya terutama dalam implementasi norma multilateral.

Setelah menganalisis peran dan kontribusi *middle power* pada tatanan normatif dan bagaimana mereka membentuk DK PBB selanjutnya, penelitian ini kemudian menganalisis apa saja faktor dan proses dari pola restrukturisasi kebijakan para *middle power*. Adapun ini kemudian di refleksikan secara spesifik pada diplomasi multilateral yang Indonesia lakukan dalam Dewan Keamanan PBB. Indonesia tentunya sebagai *middle power* terbuka untuk memilih 3 peran dari *middle power* dalam fora multilateral seperti advokator, *enforcer*, maupun *assembler* yang memiliki keterkaitan dengan posisi regional serta tekanan domestik dalam mengarungi politik internasional (Hidayatullah, 2017). Untuk mendukung narasi ini tentu diperlukan proposisi yang

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

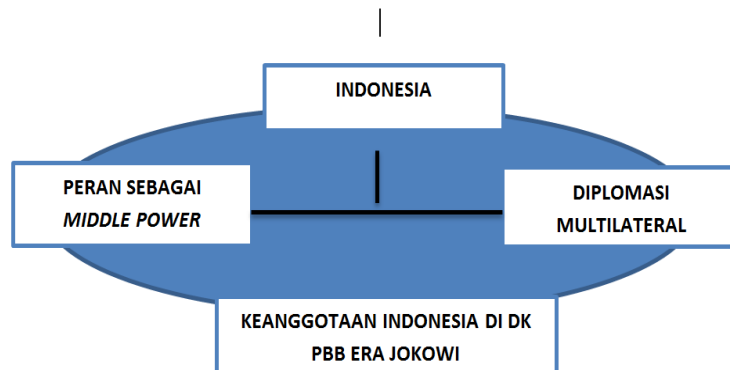
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bermain “di tengah” dan mampu menjembatani kondisi yang ada serta tensi antara *major power* (Beeson & Lee, 2015).

Penulis akan memperdebatkan hal ini dalam diskusi dengan meninjau kembali dan melakukan analisis dengan apa yang dilakukan negara anggota tidak tetap DK PBB yang berstatus sebagai *middle power* dalam 5-10 tahun ke belakang mempertimbangkan kondisi geopolitik dan perkembangan global. Kemudian dalam hal ini penulis akan menelaah dan melakukan analisis eksploratif berkaitan dengan restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan kerangka teori yang ada lebih mendalam yaitu restrukturisasi kebijakan luar negeri. Dengan ketiga variabel pemikiran dalam kerangka restrukturisasi kebijakan luar negeri yang digambarkan oleh K.J. Holsti, maka penulis menjabarkan hal tersebut yang memiliki temuan-temuan baru dalam diskursus diplomasi multilateral *middle power* Indonesia.

Gambar 4. Bagan Kerangka Penelitian

Gambar 4. Bagan Kerangka Penelitian



Hino Samuel Jose, 2022

QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sumber: Diolah oleh penulis.

C. Hipotesis/ Asumsi Penelitian

Adapun dalam penyusunan hipotesis ini, peneliti menegaskan bahwa hasil kemungkinan bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan analisis dari penelitian ini sendiri. Adapun dalam hal ini peneliti secara garis besar memberikan beberapa hipotesis sebagai berikut:

- Restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di Dewan Keamanan PBB dilakukan karena pergeseran gaya kepemimpinan dari era Presiden SBY yang sangat aktif dalam fora multilateral dan mendorong Indonesia menjadi *sperheader* berbagai aktivitas untuk mendorong norma dan kepentingan strategis Indonesia. Adapun ini bergeser ke era Presiden Jokowi dengan polugri Indonesia lebih bersifat *inward looking* dan fokus pada isu komersial dan mencari diplomasi yang dapat membawa keuntungan konkret untuk Indonesia.
- Restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai *middle power* tidak lepas dari peran ASEAN sebagai wadah kepemimpinan regional Indonesia dikarenakan *middle power* dan penentuan perannya dalam fora multilateral seperti DK PBB akan dipengaruhi dari hal tersebut ditambah pergeseran domestik yang ada. Dalam hal ini salah satu isunya adalah *regional-multilateral nexus* yang menjadi orientasi perubahan *middle power* kontemporer.
- Restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia membawa norma dan proses baru di DK PBB yang merupakan penyegaran dan salah satu wujud reformasi DK PBB agar lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
- Restrukturisasi kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB merubah nasib/ arah realita dari penyelesaian konflik selama Indonesia menjabat. Adapun ini membuktikan bahwa anggota tidak tetap DK PBB mampu menjadi kontributor

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan *contender* secara bersamaan terhadap para anggota tetap DK PBB (P5) yang terpecah dan saling tarik menarik dalam isu geopolitik masa kini.

- Peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB membawa ASEAN, Indo-Pasifik, dan Asia Timur menjadi salah satu atensi, hal ini dikarenakan kepemimpinan regional Indonesia menjadi aspirasi dalam kontribusi Indonesia dalam level global, di mana fora multilateral menjadi *norm-setter* yang semakin di konkretkan dalam inisiatif regional yang berkaitan dengan mekanisme kerja DK PBB.

Hino Samuel Jose, 2022

***QUO VADIS DIPLOMASI MULTILATERAL MIDDLE POWER: EKSPLORASI
RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI DEWAN
KEAMANAN PBB ERA PRESIDEN JOKO WIDODO***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]